



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

NOMOR 500/0001192 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DESA DAMPINGAN TAHUN 2024
DESA BOLOGARANG KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah melalui Program "Maju Bareng" untuk penanggulangan kemiskinan dengan gerakan "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan" yang digagas oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan gerakan dimaksud perlu dibentuk struktur organisasi tim untuk memudahkan pelaksanaan dan pembagian tugas agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa Dampingan Tahun 2024 Desa Bologarang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Desa Dampingan Tahun 2024 Desa Bologarang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Guna membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelola Desa Dampingan Tahun 2024 Desa Bologarang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah maka dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Desa Dampingan Tahun 2024 Desa Bologarang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Pengelola Desa Dampingan kepada Sekreatris Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan
b. Sumber Anggaran yang sah lainnya.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Biro Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


JULY EMMYLIA

SALINAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500/000/1192
TANGGAL : 12 Februari 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
DESA DAMPINGAN TAHUN 2024
DESA BOLOGARANG KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
PADA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	July Emmylia, S.E., M.M.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2	Agus Prasutio, S.H., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Ketua
3	Eny Haryanti, S.Pd., M.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Sekretaris
4	Ariadi Wibowo, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5	Supriyatno, S.H., M.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	Jarot Mulyawan, S.E., M.Si., Akt.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	Andre Wahyu Yudhantoro, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8	Asih Hariyati, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


JULY EMMYLIA

**SUSUNAN POKJA
 DESA DAMPINGAN TAHUN 2024
 DESA BOLOGARANG KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
 PADA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	POKJA	SUSUNAN TIM	FOKUS POKJA
1	Budaya	1. Eny Haryanti, S.Pd., M.Pd. (Koordinator) 2. Rangga Dwi Septian, S.Tra. 3. Maretia Hasma, S.STP., M.M.	a. Pembinaan budaya daerah melalui pelatihan tari Khas Grobogan (Tayub) b. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) yang ramah perempuan dan peduli anak bekerjasama dengan DP3AKB Prov. Jateng
2	Sosial	1. Asih Hariyati, S.E., M.Si. (Koordinator) 2. DK Ristiyanto, S.E. 3. Herlina, AP., M.M. 4. Fatimah Aprilia Wijaya, S.STP.	a. Bakti Sosial pemberian Makanan Bergizi b. Bakti Sosial untuk masyarakat miskin berupa pembagian beras dan mie bekerjasama dengan Dishanpan Prov. Jateng
3	Kewirausahaan	1. Jarot Mulyawan, S.E., M.Si., Akt. (Koordinator) 2. Yudhi Rengga S., S.STP., M.M. 3. Kadang Tri S., A.Md.A.Pj.	a. Fasilitasi pelatihan wirausaha pengolahan makanan lokal dari potensi daerah berupa pisang dan singkong bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng b. Bantuan penyediaan modal kerja dan alat pengolahan bekerjasama dengan BAZNAS Prov. Jateng
4	Kesehatan	1. Ariadi Wibowo, S.E., M.M. (Koordinator) 2. Sumadi 3. Eko Kriswinarso, S.ST(TD) 4. Ayu Yuliana Setyaningrum, S.E.	Bakti sosial berupa pengobatan massal bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Prov. Jateng
5	Sarana dan Prasarana	1. Supriyatno, S.H., M.H. (Koordinator) 2. Sri Endah Mulyani, S.E., M.Sc., MAP 3. Fajar Maulana, S.STP.	a. Bantuan pembuatan embung desa bekerjasama dengan Dinas Pusdataru Prov. Jateng b. Pelatihan pemanfaatan internet desa dengan baik serta intervensi penyediaan akses internet desa berkoordinasi dengan Diskominfo Prov. Jateng
6	Rumah Tidak Layak Huni dan Jambanisasi	1. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E., M.M. (Koordinator) 2. Ananditya Damayanti, S.Tr.IP 3. Ayu Iswahyu N., A.Md.A.Pj. 4. David Immanuel P. N., A.Md.A.Pj.	c. Bantuan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bekerjasama dengan BUMD Prov. Jateng d. Pemberian bantuan jambanisasi bekerjasama dengan BUMD BUMD Prov. Jateng e. Bantuan penyediaan tangki air bersih bekerjasama dengan BUMD Prov. Jateng

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

JULY EMMYLIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500/000/1192
TANGGAL : 12 Februari 2024.

TUGAS TIM PENGELOLA
DESA DAMPINGAN TAHUN 2024
DESA BOLOGARANG KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
PADA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

1. Melaksanakan *assesment* untuk mengetahui permasalahan, potensi dan kebutuhan yang ada di Desa Dampingan;
2. Melakukan pendampingan Desa Dampingan dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi dan sumber daya alam yang ada di Desa Dampingan;
3. Menentukan intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai hasil *assesment* permasalahan, potensi dan kebutuhan yang ada di Desa Dampingan;
4. Melakukan pemantauan terhadap intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Dampingan;
5. Mengevaluasi efektivitas intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Dampingan;
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Desa Dampingan setiap tahun yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


JULY EMYLIA